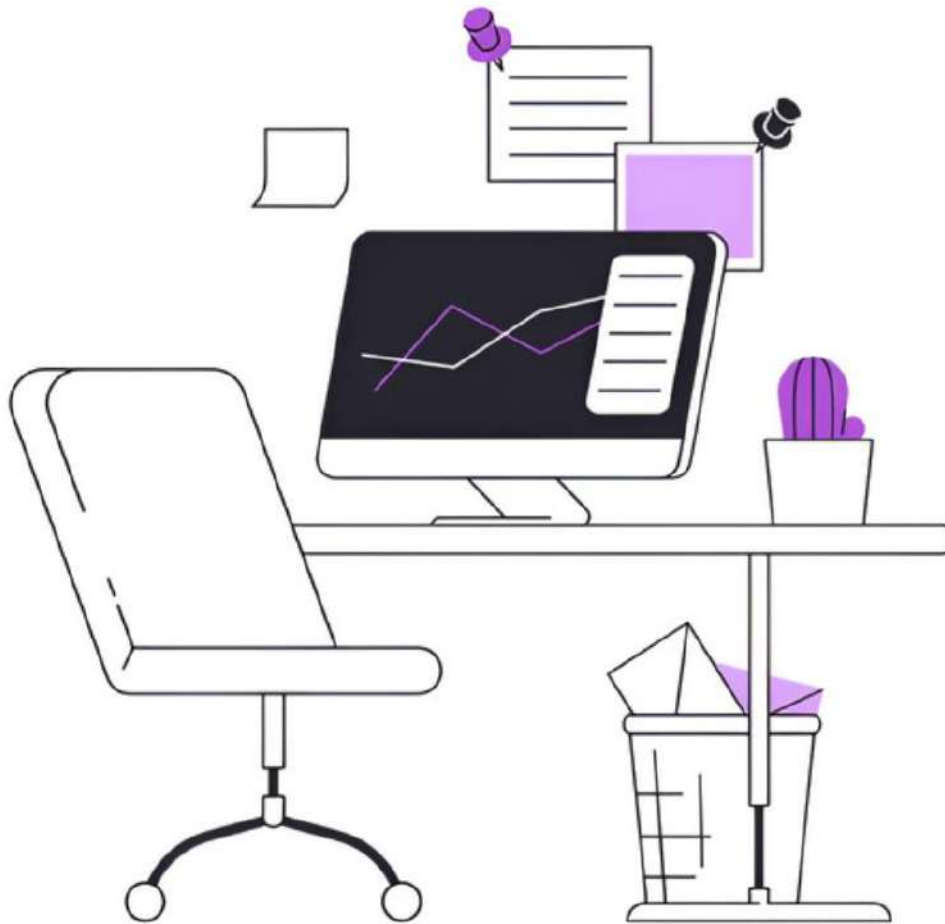




Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya



RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 ini dapat tersusun. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2024 Dinas Sosial, Renja tahun 2024 perlu disusun dalam dokumen karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur perubahan urusan pemerintahan dan munculnya fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Dan juga di dasarkan pada kebijakan dari pemerintah pusat dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak dari Dinas. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya menyusun Renja Perangkat Daerah untuk pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun tersebut, mengetahui capaian kinerja tahun 2022 sampai dengan triwulan IV, dan bisa melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan, perubahan SOTK dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini. Akhirnya kami berharap dengan adanya Renja ini program dan kegiatan di Dinas Sosial dapat berjalan dengan baik.

Sungai Raya, Januari 2024

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**

Wasilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196708081999031010

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	2
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	44
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	74
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	74
3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	75
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	101
BAB V PENUTUP	107



Daftar Tabel

TABEL 2. 1	14
TABEL 2. 2	32
TABEL 2. 3	43
TABEL 2. 4	47
TABEL 3. 1	80
TABEL 4. 1	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra SKPD, Hasil evaluasi Renja Tahun lalu dan Hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Renja Perangkat Daerah mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang mengusung tema “Pemulihan dan Penajakan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya”. Tema tersebut memiliki kata kunci penguatan SDM unggul dan pemulihan sosial ekonomi.

Selaras dengan mewujudkan SDM yang berdaya secara ekonomi, maka dalam urusan sosial erat kaitannya dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut sesuai dengan dengan amanat undang-undang Kesejahteraan Sosial nomor 11 Tahun 2009 bahwa Dinas Sosial menjadi penggerak dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan perannya tersebut Dinas Sosial perlu mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial sebagai Mitra Dinas Sosial dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Penyediaan data yang akurat menjadi hal yang penting dan mendasar bagi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Selain itu pengembangan pelayanan Dalam Balai menjadi prioritas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Selain memprioritaskan



Pelayanan Dalam Balai, Dinas Sosial juga masih melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Luar Balai dan Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Restorasi Sosial.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja



- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6) sebagaimana telah diubah



- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);
 25. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61)

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial adalah untuk mengawali proses perencanaan penganggaran sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; bahwa Perangkat Daerah menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2025 adalah untuk memperjelas arah kebijakan dan sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
3. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah



4. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. BAB V Penutup

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi dana Rp. 5.829.692.921,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 5.757.159.921,- atau 98,76% dan Belanja Modal Rp. 72.533.000,- atau 1,24%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total pagu Rp 4.368.286.276,- terealisasi sebesar Rp **3.931.341.025,50,- dengan persentase sebesar 90%**

Dibagi dalam beberapa kegiatan/sub kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu Rp 78.948.020,- dibagi kedalam 3 sub kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 32.828.423, terealisasi sebesar Rp **32.820.863,- dengan persentase sebesar 99,98%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan Pagu Rp 23.631.950,- terealisasi sebesar Rp **23.625.651,- dengan persentase 99,97%** telah terlaksana dengan baik



- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp 22.487.647,- terealisasi sebesar Rp **22.483.657,- dengan persentase 99,98%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp 3.041.977.988,- di bagi kedalam 4 Sub Kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Rp 2.995.961.809, terealisasi sebesar Rp **2.672.338.563,50 dengan persentase 89,20%** tidak dapat di realisasikan dengan baik karena adanya penangguhan pembayaran TPP Pegawai yang baru dicairkan di Februari 2024
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Pagu Rp 26.341.853,- terealisasi sebesar Rp **26.285.872,- dengan persentase 99,79%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan Pagu 12.384.482,- terealisasi sebesar Rp **12.384.402,- dengan persentase 100%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dengan Pagu 7.289.844,- terealisasi sebesar Rp **7.176.090,- dengan persentase 98,44%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Pagu Rp 14.724.717,- dibagi kedalam 3 Sub Kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 5.642.626,- terealisasi sebesar Rp **4.193.049,- dengan persentase 74,31%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
 - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan Pagu Rp 3.260.528,- terealisasi sebesar Rp **3.198.002,- dengan persentase 98,08%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan Pagu Rp 5.821.563,- terealisasi sebesar Rp **5.756.108,- dengan persentase 98,88%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu Rp 328.422.974,- dibagi dalam 5 Sub Kegiatan yaitu :



- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Pagu Rp 5.988.500,- terealisasi sebesar Rp **5.880.000,- dengan persentase 98,19%** telah terlaksana dengan baik
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Pagu Rp 102.322.714,- terealisasi sebesar Rp **82.199.853,- dengan persentase 80,33%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Pagu Rp 24.812.760,- terealisasi sebesar Rp **18.509.040,- dengan persentase 74,59%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Pagu Rp 7.200.000,- terealisasi 100% telah terlaksana dengan baik
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Pagu Rp 188.099.000,- terealisasi sebesar Rp **174.079.726,- dengan persentase 92,55%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Pagu Rp 270.793.000,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Rp 72.643.000, terealisasi sebesar Rp **68.720.000,- dengan persentase 94,60%** telah terlaksana dengan baik
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 198.150.000,- terealisasi sebesar Rp **198.000.000,- dengan persentase 99,92%** telah terlaksana dengan baik
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp 528.787.077,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu Rp 41.904.000.- terealisasi sebesar Rp **40.724.000,- dengan persentase 97,18%** telah terlaksana dengan baik



- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Pagu Rp 486.883.077,- terealisasi sebesar Rp **432.149.081,- dengan persentase 88,76%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Rp 104.632.500,- dibagi kedalam 5 Sub Kegiatan yaitu :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Pagu Rp 31.162.500,- terealisasi sebesar Rp **28.538.318,- dengan persentase 91,58%** telah terlaksana dengan baik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Pagu Rp 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp **44.408.750,- dengan persentase 88,82%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Pagu Rp 6.570.000,- terealisasi sebesar Rp **4.380.000,- dengan persentase 66,67%** dikarenakan adanya beberapa belanja barang yang tidak dapat di cairkan disebabkan adanya keterbatasan waktu dalam pencairan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud dengan Rp 10.800.000,- terealisasi 100%
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Pagu Rp 6.100.000 terealisasi sebesar Rp **5.490.000,- dengan persentase 90%** telah terlaksana dengan baik

Dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar 90% dan realisasi kinerja sebesar 93,58% hal ini hampir mencapai target sebesar 100%

Rata rata sub kegiatan telah sesuai dengan target perencanaan yang telah di tetapkan, Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya realiasi anggaran dan



kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran pada tahun berjalan sehingga menghambat ketetapan dan waktu pelaksanaan kegiatan.

2. Program Pemberdayaan Sosial dengan total Pagu Rp 67.237.321,-

Dibagi dalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :

- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 67.237.321,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 30.185.557,- terealisasi sebesar Rp **27.109.685,- dengan persentase 89,81%** dikarenakan adanya hambatan dalam pengadaan kegiatan rapat dan koordinasi hal ini disebabkan sulitnya menemukan waktu dalam koordinasi karena pekerja sosial memiliki kesibukan yang berbeda beda
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu Rp 37.051.764,- terealisasi sebesar Rp **36.757.877,- dengan persentase 99,21%** telah terlaksana dengan baik

Dari Program Pemberdayaan Sosial telah memenuhi penyerapan anggaran sebesar 94,99% dan realisasi kinerja sebesar 100%

Sub kegiatan hampir memenuhi target realisasi anggaran dan dapat dikatakan baik, Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya realisasi anggaran adalah waktu pelaksanaan koordinasi dan rapat yang terbatas, keterbatasan peserta pekerja sosial yang tidak dapat hadir dalam koordinasi menjadi penghambat dalam merealisasikan belanja pada anggaran belanja, meskipun begitu koordinasi dalam tetap berjalan dengan baik dengan sistem jemput bola yaitu turun langsung ke lapangan di setiap kecamatan untuk berkoordinasi tentang pemberdayaan sosial.

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan Pagu Rp 1.329.446,- didalam Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, untuk program dan kegiatan ini



tidak dapat direalisasikan baik dari segi anggaran maupun kinerja karena realisasinya tidak bisa di prediksi tergantung situasi dan kondisi di lapangan, sementara untuk tahun 2023 tidak ada kejadian atau laporan tentang warga migran korban tindak kekerasan sehingga tidak ada pelayanan yang dapat dilakukan oleh Dinas Sosial.

4. Program Rehabilitasi Sosial dengan Pagu Rp 1.265.818.852,-

Dibagi kedalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp 406.673.873,- dibagi kedalam 3 Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan Pagu Rp 42.289.194,- terealisasi sebesar Rp **27.156.402,- dengan persentase 64,22%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Rp 181.542.239,- terealisasi sebesar Rp **169.242.557,- dengan persentase 93,22%**
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Rp 182.842.440,- terealisasi sebesar Rp **155.217.062,- dengan persentase 84,89%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan Pagu Rp 792.137.767,- dibagi kedalam 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dengan Pagu Rp 67.007.212,- terealisasi sebesar Rp **60.319.759,- dengan persentase 90,02%** telah terlaksana dengan baik
- Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar dengan Pagu Rp 792.137.767,- terealisasi sebesar Rp **783.052.752,- dengan persentase 98,85%** telah terlaksana dengan baik



Dari Program Rehabilitasi Sosial telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar Rp 94,40%, dan realisasi kinerja sebesar 90,8%. Angka ini sudah cukup baik, mengingat pada program Program Rehabilitasi Sosial kegiatan yang dilakukan bersifat *accidentally* dan tidak dapat di prediksi waktu pelaksanaannya.

Dalam kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sub kegiatan Penyediaan Permakanan, anggaran tidak dapat direalisasikan sepenuhnya karna untuk dalam pengadministrasian pencairan pemesana makanan itu sendiri membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, sementara kenyataan dilapangan tidak bisa sejalan dengan administrasi pencairan, makanan tetap terlaksana tetapi tidak dengan pengadministrasian pencairannya dana anggaran.

5. Program Penanganan Bencana dengan Pagu Rp 127.021.026,-

Dibagi kedalam beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan :

- Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota jumlah Pagu Rp 80.416.820,- dengan Sub Kegiatan Penyediaan Makanan terealisasi sebesar Rp **51.837.330,- dengan persentase 64,46%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang
- Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan Jumlah Pagu Rp 46.604.206,- dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana terealisasi sebesar Rp **41.575.708,- dengan persentase 89,21%** dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat di prediksi mengakibatkan kurang tepat waktu dalam melaksanakan pencairan belanja barang

Dari Program Penanganan Bencana telah memenuhi penyerapan realisasi anggaran sebesar 73,54% dan realisasi kinerja lebih dari 100%, meskipun tidak ada hambatan dalam realisasi kinerja, namun kurangnya waktu dalam mengadministrasikan pencairan anggaran menjadi penghambat dalam pemenuhan realisasi anggaran.



TABEL 2. 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya s/d Tahun 2024**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1 0 0 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	0	100
1 0 0 0 6 2 2 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kegiatan	2	2	2	2	100	2	0	0%



1	0 0 2 0 00 6 2 3 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	20	20	20	100	20	0	0%
1	0 0 2 0 00 6 2 3 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	69	21	23	23	100	21	0	0%
1	0 0 6 3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase	100	-	12	0	0	100	0	0%
1	0 0 2 0 6 3 1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	25	-	12	0	0	13	0	0%



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	-	12	0	0	13	0	0%	
1	0	0	6	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	79.5	100	90.8	90.8	100	90.1	90%	
1	0	0	6	4	2	0	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	100	116	100	81.6	81.6	100	99.2	99%



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120		60	59	98.33	60	119	99%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-		-			
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	240		120	121	108	120	241	100%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang			-	-	-	-		



1	0	0	2	0	00	1	06	4	1	05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	500	290	250	112	44.8	250	652	130%		
1	0	0	2	0	00	1	06	4	1	06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	0	0	2	0	00	1	07	4	1	07	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	2	0	00	1	08	4	1	08	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-			
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-			
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	-	-	-	-	-			
1	0	0	2	0	00	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	43.33	100	100	100	100	81.11	81%



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	Orang	600	130	300	359	100	300	789	132%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Orang	200000	-	200000	200000	100	-	200000	100%
1	0	0				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penanganan Fakir Miskin	Persentase	100	246.65	-	-	-	100	115.55	116%
1	0	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar										
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang								



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang	-	-	-	-	-		
1	0	0	2	0	02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	62000	161006	-	-	10000	171006	276%
1	0	0	2	0	01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	62000	161006	-	-	10000	171006	276%
1	0	0	2	0	02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	38000	188810	-	-	21000	209810	552%



1	06	05	2	02	0003	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	20000	-	-	20000	20000	100%		
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	100	236	100	100	100	145.3333333	145%	
1	06	06	2	01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	412	483	204	644	100	208	1335	324%
1	06	06	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	412	483	204	644	100	208	1335	324%



1	06	06	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	4	2	2	2	100	2	6	150%
1	06	06	2	02	0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	104	52	51	51	100	52	155	149%
1	06					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100		100		100	93.59	31.1961111	31%
1	06	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100%
1	06	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	5	5	5	100	6	16	160%



1	06	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	1	1	1	100	5	7	350%
1	06	01	2	01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	4	4	4	100	1	9	113%
1	06	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100%
1	06	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	44	14	23	23	100	23	60	136%
1	06	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24		12	12	100	1312	1324	5517%



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	1	1	1	100	1	3	150%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	24	12	12	12	100	17	41	171%
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah	persentase	100		100	100	100	100	66.66666667	67%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2		1	1	100	2	3	150%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2		1	1	100	1	2	100%



1	0612030005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan													
1	0612030006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2			1	1	100	5	6	300%				
1	061205	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian	Dokumen	100			-	-	-	-		0%				
1	06120502	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		1		-		-	1	2	100%				
1	0612050003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrai Kepegawaian	Dokumen				-		-		0					
1	0612050011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12			-		-	5	5	42%				



1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	92.57	92.57	100	97.5233333	98%
1	0	0	2	0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	12	1	1	100	1	14	200%
1	0	0	2	0	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah AC	Unit		14	-	-	-	1	15	100%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	7	3	4	4	100	17	24	343%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	7	3	3	3	100	5	11	157%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	12	12	12	100	365	389	1621%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	566	12	283	178	62.89	250	440	78%



1	0	0	2	0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen				-		-		0	#DIV/0!
1	0	0	2	0	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	14			-		-	14	14	100%
1	0	0	2	0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	111	25		8	8	100	27	60	54%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	6	-		-	-	-	-		
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-		-	-	-	-		
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	103	16		-		-	20	36	35%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	9		5	5	100	4	18	450%



1	06120700	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	12	3	3	100	3	18	600%
1	061208	0008	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase	100	100	100	100	100	42	242	242%
1	06120802	0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	12	12	12	100	24	48	200%
1	06120804	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	12	12	12	100	18	42	175%
1	061209	0009	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	126		39	24	61.53		24	19%



1	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14	12	7	7	100	1	20	143%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2		1	1	100	7	8	400%
1	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	103					-		
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	14	9	14	6	42.85	5	20	143%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1		1	1	100	1	2	200%
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di pelihara	Unit	1	8	16	9	56.25	16	33	3300 %



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya telah menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase capaian program prioritas Kabupaten Kubu Raya. Indikator ini merupakan bentuk tindak lanjut terhadap data dan informasi yang diinventarisasi dan dihimpun dalam dokumen-dokumen seperti Kubu Raya Dalam Angka, Profil Daerah, guna mengukur seberapa besar capaian kinerja SKPD yang dihubungkan dengan capaian program prioritas serta visi-misi Kabupaten Kubu Raya.
- 2) Persentase kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD terhadap dokumen perencanaan SKPD; Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup ekonomi terhadap dokumen perencanaan SKPD; dan Persentasi kesesuaian usulan program/kegiatan SKPD lingkup sosial budaya terhadap dokumen perencanaan SKPD Proses ini merupakan bagian dari tahapan dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang akuntabel.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya seperti pada table 2.2 berikut ini:

TABEL 2. 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	532	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Data Penyandang Disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
2	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



3	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dijangkau	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	532	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
4	Jumlah kendaraan roda empat yang diakses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	3	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
5	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang menerima paket pemakanan sesuai standar gizi	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	85	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



	Jumlah Rumah Singgah/Shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	262	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



	Jumlah Alat Bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Paket Perbekalan kesehatan yang tersedia	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan Kesehatan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



	Jumlah Tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Pekerja sosial/TKSK/dan atau Relawan Sosial yang disediakan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



	<p>Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standard dikeluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial</p>	<p>Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota</p>	<p>515</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>75.70%</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	
	<p>Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat</p>	<p>Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota</p>	<p>515</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>75.70%</p>	<p>100%</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	



	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	1	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	26	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	
	Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	92	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%	



Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	66	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%
Jumlah Penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar dan gepeng yang dirujuk	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota	26	100%	100%	100%	100%	75.70%	100%	80%	85%
Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan makanan	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	644	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%



Jumlah Korban Bencana yang menerima paket sandang	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	644	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%
Jumlah Tempat Tinggal penampungan pengungsi yang dimiliki	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%
Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%
Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%



	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan atau relawan sosial yang tersedia	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	59	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	80%	85%	
--	---	--	----	------	------	------	------	---------	------	-----	-----	--



TABEL 2. 2.2

Pencapaian Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	B 75	A 80	B 75	B 75	B 71.5	A 80	B 75	B 75
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Reformasi Birokra Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%	100%	90%	95%	99%	100%	90%	95%



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Ketercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan penanganan PPKS di Kabupaten Kubu Raya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam menyelenggarakan penanganan PPKS, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

Banyak permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan, antara lain:

1. Masih Tingginya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya.
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program Kesejahteraan sosial masih sangat terbatas.
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain.
4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayananan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran.
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri.
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal.
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas.
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.
9. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:



- 1) Peningkatan sistem penyediaan akses kebutuhan dasar bagi PPKS.
- 2) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 3) Optimalisasi anggaran pembiayaan dalam mendukung pencapaian pelayanan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial.
- 4) Optimalisasi sumber daya manusia aparatur bidang pelayanan sosial.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- 1) Memiliki rencana strategis sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- 2) Memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
- 3) Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Sosial mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu menjadikan Kabupaten Kubu Raya terdepan dan berkualitas.
- 4) Tersedianya dana untuk menunjang program dan kegiatan.

Sementara faktor-faktor di Dinas Sosial yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Dinas Sosial adalah:

- 1) Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dilaksanakan.
- 3) Belum optimalnya perencanaan anggaran.
- 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan dan belum optimalnya koordinasi antara bidang yang ada.



2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Dinas Sosial merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Pembangunan Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kubu Raya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kabupaten Kubu Raya membutuhkan sinergisitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergisitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dirasa masih belum bisa mengakomodir semua kegiatan.

TABEL 2. 3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Kubu Raya

Kode	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Kebutuhan Dana (Rp.)	
			Indikator	Satuan					Indikator	Satuan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1002	PROGRAM PEMBER DAYAAN SOSIAL	KKR	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	Rp 60.000.000	PROGRAM PEMBER DAYAAN SOSIAL	KKR	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase	100	Rp 60.000.000	
100203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	KKR	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kegiatan	2	Rp 60.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	KKR	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kegiatan	2	Rp 60.000.000	



						Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota					
1	0	0	2	0	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp 30.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan	KKR	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	Rp 30.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan	KKR	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	20	Rp 30.000.000



						Kabupaten/Kota						Kabupaten/Kota					
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	KKR	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Perentase	100	Rp 15.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	KKR	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Perentase	100	Rp 15.000.000
1	0	0	2	0	1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan	KKR	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	5	Rp 15.000.000	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan	KKR	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	5	Rp 15.000.000



						n ke Desa/Kel urahan asal						n ke Desa/Kel urahan asal						
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulang an Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasa n dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangk an ke Desa/Kel urahan Asal	KK R	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Oran g	5	Rp 15.000 .000	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulang an Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasa n dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk dipulangk an ke Desa/Kel urahan Asal	KK R	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Oran g	5	Rp 15.000. 000	



1	0	0				PROGRA M REHABILI TASI SOSIAL	KK R	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 440.00 0.000	PROGRA M REHABILI TASI SOSIAL	KK R	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 440.000 .000
1	0	0	2	0	1	Kegiatan Rehabilita si Sosial Dasar Penyanda ng Disabilita s Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandan gan Pengemis di Luar Panti Sosial	KK R	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 320.00 0.000	Kegiatan Rehabilita si Sosial Dasar Penyanda ng Disabilita s Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandan gan Pengemis di Luar Panti Sosial	KK R	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 320.000 .000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	Rp 50.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	KKR	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	KKR	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp 150.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33	Rp 150.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	KKR	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	KKR	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	Rp 50.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	KKR	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	KKR	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 10.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	KKR	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	Rp 120.000.000	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	KKR	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	100	Rp 120.000.000



						Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial					Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial						
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	KKR	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 60.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	KKR	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 60.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 60.000.000	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Orang	50	Rp 60.000.000
1	0	0				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KKR	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	100	Rp 670.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	KKR	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	100	Rp 670.000.000
1	0	0	2	0	01	Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	KKR	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Persentase	100	Rp 20.000.000	Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	KKR	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Persentase	100	Rp 20.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	KKR	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	KKR	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang	10	Rp 10.000.000



1	065201003	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	KKR	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang	10	Rp 10.000.000	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	KKR	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang	100	Rp 10.000.000
1	065202	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KKR	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	1000	Rp 650.000.000	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KKR	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	1000	Rp 650.000.000
1	065202001	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KKR	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	1000	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KKR	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	Orang	1000	Rp 50.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengelola an Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KK R	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kelu arga	21 00 0	Rp 50.000 .000	Sub Kegiatan Pengelola an Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	KK R	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kelu arga	21 00 0	Rp 50.000. 000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK R	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelu arga	20 00 0	Rp 550.00 0.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK R	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelu arga	20 00 0	Rp 550.000 .000
1	0	0				PROGRA M PENANGA NAN BENCANA	KK R	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 100.00 0.000	PROGRA M PENANGA NAN BENCANA	KK R	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Perse ntase	10 0	Rp 100.000 .000
1	0	0	2	0	1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	KK R	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Oran g	20 4	Rp 50.000 .000	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	KK R	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Oran g	20 4	Rp 50.000. 000



1	06201001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	204	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	KKR	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	204	Rp 50.000.000
1	06202	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	2	Rp 50.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	KKR	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	2	Rp 50.000.000
1	06202002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	KKR	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	52	Rp 50.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	KKR	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	52	Rp 50.000.000



1	0					PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH	KK R	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	1	Rp 5.317. 236.55 1	PROGRA M PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH	KK R	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	1	Rp5.317 .236.55 1
1	0	0	2	0		Kegiatan Perencan aan, Pengg angan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengg angan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	13	Rp 210.00 0.000	Kegiatan Perencan aan, Pengg angan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengg angan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	13	Rp 210.000 .000
1	0	0	2	0	00 01	Sub Kegiatan Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	3	Rp 30.000 .000	Sub Kegiatan Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	3	Rp 30.000. 000
1	0	0	2	0	00 02	Sub Kegiatan Koordinas i dan Penyusun an Dokumen	KK R	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Doku men	1	Rp 30.000 .000	Sub Kegiatan Koordinas i dan Penyusun an Dokumen	KK R	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Doku men	1	Rp 30.000. 000



1	061200	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKR	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	Rp 30.000.000
1	061200	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 30.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	Rp 30.000.000
1	061202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	43	Rp 3.050.000.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	43	Rp3.050.000.000
1	061202	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23	Rp 3.000.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKR	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	23	Rp3.000.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13 12	Rp 30.000 .000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	13 12	Rp 30.000. 000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 10.000 .000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	Rp 10.000. 000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Laporan	17	Rp 10.000 .000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	KKR	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	Laporan	17	Rp 10.000. 000



						Semester an SKPD		nan/Semesteran SKPD				Semester an SKPD		nan/Semesteran SKPD			
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	8	Rp 15.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KK R	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	8	Rp 15.000.000
1	0	0	2	0	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KK R	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Rp 5.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KK R	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	Rp 5.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Rp 5.000.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKR	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	Rp 5.000.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKR	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	5	Rp 81.119.850	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KKR	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	5	Rp 81.119.850
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	KKR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	Rp 28.334.850	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	KKR	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	Rp 28.334.850



						Atribut Kelengkapannya					Atribut Kelengkapannya						
1	0	0	2	0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KKR	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	7	Rp 10.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KKR	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	7	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	Rp 42.785.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKR	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	Rp 42.785.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Paket pelayanan operasional kantor (Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Paket	27	Rp 405.380.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KKR	Jumlah Paket pelayanan operasional kantor (Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Paket	27	Rp 405.380.000



1	0	0	2	0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KK R	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 6.000. 000	Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	KK R	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Rp 6.000.0 00
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KK R	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	17	Rp 110.00 0.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KK R	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	17	Rp 110.000 .000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	KK R	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	Rp 40.000 .000	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggunaan	KK R	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5	Rp 40.000. 000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	KK R	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	36 5	Rp 4.380. 000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	KK R	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	36 5	Rp 4.380.0 00



1	06120609	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	Rp 200.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKR	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	Rp 200.000.000
1	06120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	300	Rp 5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	300	Rp 5.000.000
1	06120611	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	14	Rp 40.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	KKR	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	14	Rp 40.000.000
1	061207	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	55	Rp 857.738.790	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KKR	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	55	Rp 857.738.790



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	Rp 234.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	Rp 234.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	KKR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	Rp 54.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	KKR	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12	Rp 54.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	34	Rp 371.588.790	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKR	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	34	Rp 371.588.790
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Rp 198.150.000	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KKR	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	Rp 198.150.000



1	0	0	2	0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	37	Rp 540.00 0.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	37	Rp 540.000 .000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	Rp 60.000 .000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	Rp 60.000. 000
1	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	Rp 480.00 0.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KK R	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	13	Rp 480.000 .000
1	0	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	43	Rp 157.99 7.911	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KK R	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	43	Rp 157.997 .911



1	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 29.062.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKR	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	Rp 29.062.500
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	Rp 75.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKR	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	Rp 75.000.000



1	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Mebel	KK R	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	12	Rp 29.585 .411	Pemeliharaan Mebel	KK R	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	12	Rp 29.585. 411	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	KK R	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	Rp 9.950. 000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	KK R	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	Rp 9.950.0 00	
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KK R	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1 Unit	Rp 14.400 .000	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	KK R	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1 Unit	Rp 14.400. 000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kubu Raya, Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya ialah meningkatkan kualitas hidup para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ada di Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta sistem administrasi pelaporan kinerja dan keuangan

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya
Tahun 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	
					2025	2026
1	Meningkatnya transparansi akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Transparansi Akuntabilitas dan Keuangan	Nilai SAKIP	B (75)	B (75)
2	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan PPKS	Persentase Penanganan PPKS	90%	95%

3.2 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



-
- 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
- 2.1 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
- 3.1 Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

4. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

4.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
- Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
- Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

4.2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

5. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

5.1 Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar

- Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar
- Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar

5.2 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota



- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

6. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 6.1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- 6.2 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana



TABEL 3. 2

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025 DAN PERLIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN KUBU RAYA**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Indikator	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 0 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 60.000.000	APBD		100	Rp 60.000.000
1 0 6 2 2 0 3	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kegiatan	KKR	2	Rp 60.000.000	APBD		2	Rp 60.000.000



1	06220300	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	20	Rp 30.000.000	APBD	20	Rp 30.000.000
1	06220300	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat Kapasistasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	KKR	20	Rp 30.000.000	APBD	20	Rp 30.000.000
1	0603		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Ditangani	Persentase	KKR	100	Rp 15.000.000	APBD	100	Rp 15.000.000
1	060320	01	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	KKR	5	Rp 15.000.000	APBD	5	Rp 15.000.000



						dari titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal								
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari titik debarisasi di daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	5	Rp 15.000.000	APBD	5	Rp 15.000.000
1	0	0				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 440.000.000	APBD	100	Rp 440.000.000



1	06	04	2	01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 320.000.000	APBD		100	Rp 320.000.000
1	06	04	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	5	Rp 50.000.000	APBD		5	Rp 50.000.000
1	06	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	33	Rp 10.000.000	APBD		33	Rp 10.000.000



1	06420100	003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	33	Rp 150.000.000	APBD		33	Rp 150.000.000
1	06420100	004	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000
1	06420100	005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	100	Rp 50.000.000	APBD		100	Rp 50.000.000
1	06420100	006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	50	Rp 10.000.000	APBD		50	Rp 10.000.000



						serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat									
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	KKR	10	Rp 5.000.000	APBD		10	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 5.000.000	APBD		10	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	10	Rp 10.000.000	APBD		10	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase	KKR	100	Rp 120.000.000	APBD		100	Rp 120.000.000



1	0	0	2	0	00	08	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	Orang	KKR	50	Rp 60.000.000	APBD		50	Rp 60.000.000
1	0	0	2	0	00	10	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Orang	KKR	50	Rp 60.000.000	APBD		50	Rp 60.000.000
1	0	0					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak-Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 670.000.000	APBD		100	Rp 670.000.000
1	0	0	2	0			Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	Persentase Anak-Anak Terlantar yang Dirujuk	Persentase	KKR	100	Rp 20.000.000	APBD		100	Rp 20.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rujukan anak anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	Orang	KKR	100	Rp 10.000.000	APBD		100	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpelihara kewenangan kabupaten/kota	Orang	KKR	100	Rp 10.000.000	APBD		100	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota (DTKS)	Orang	KKR	1000 0	Rp 650.000.000	APBD		1000 0	Rp 650.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	KKR	1000 0	Rp 50.000.000	APBD		1000 0	Rp 50.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	KKR	2100 0	Rp 50.000.000	APBD		2100 0	Rp 50.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	Keluarga	KKR	2000 0	Rp 550.000.000	APBD		2000 0	Rp 550.000.000
1	0	0				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase	KKR	100	Rp 100.000.000	APBD		100	Rp 100.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Bantuan	Orang	KKR	204	Rp 50.000.000	APBD		204	Rp 50.000.000



1	06	06	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	204	Rp 50.000.000	APBD		204	Rp 50.000.000
1	06	06	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kali	KKR	2	Rp 50.000.000	APBD		2	Rp 50.000.000
1	06	06	2	02	0002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	KKR	52	Rp 50.000.000	APBD		52	Rp 50.000.000
1	06					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	KKR	1	Rp5.317.236.551	APBD		1	Rp5.145.991.158



1	0	0	2	0		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	13	Rp 210.000.000	APBD		13	Rp 210.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	3	Rp 30.000.000	APBD		3	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dokumen	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Dokumen	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Dokumen	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	KKR	5	Rp 30.000.000	APBD		5	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	KKR	1	Rp 30.000.000	APBD		1	Rp 30.000.000



1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	43	Rp3.050.000.000	APBD		43	Rp3.050.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	KKR	23	Rp3.000.000.000	APBD		23	Rp3.000.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	KKR	1312	Rp 30.000.000	APBD		1312	Rp 30.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	KKR	1	Rp 10.000.000	APBD		1	Rp 10.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	KKR	17	Rp 10.000.000	APBD		17	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	KKR	8	Rp 15.000.000	APBD		8	Rp 15.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	KKR	2	Rp 5.000.000	APBD		2	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	KKR	1	Rp 5.000.000	APBD		1	Rp 5.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	KKR	5	Rp 5.000.000	APBD		5	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang difasilitasi	Orang	KKR	5	Rp 81.119.850	APBD		5	Rp 81.119.850
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	KKR	1	Rp 28.334.850	APBD		1	Rp 28.334.850
1	0	0	2	0	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	KKR	7	Rp 10.000.000	APBD		7	Rp 10.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	KKR	5	Rp 42.785.000	APBD		5	Rp 42.785.000



1	0	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket pelayanan operasional kantor (Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah)	Paket	KKR	27	Rp 405.380.000	APBD		27	Rp 405.380.000
1	0	0	2	0	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	KKR	1	Rp 6.000.000	APBD		1	Rp 6.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	KKR	17	Rp 110.000.000	APBD		17	Rp 110.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	KKR	5	Rp 40.000.000	APBD		5	Rp 40.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	KKR	365	Rp 4.380.000	APBD		365	Rp 4.380.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	KKR	250	Rp 200.000.000	APBD		250	Rp 200.000.000
1	0	0	2	0	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	KKR	300	Rp 5.000.000	APBD		300	Rp 5.000.000
1	0	0	2	0	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	KKR	14	Rp 40.000.000	APBD		14	Rp 40.000.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	KKR	55	Rp 857.738.790	APBD		69	Rp 681.133.397
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	KKR	6	Rp 234.000.000	APBD		1	Rp 39.000.000



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	KKR	12	Rp 54.000.000	APBD		21	Rp 29.585.411
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	KKR	34	Rp 371.588.790	APBD		44	Rp 414.397.986
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	KKR	3	Rp 198.150.000	APBD		3	Rp 198.150.000
1	0	0	2	0		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	KKR	37	Rp 540.000.000	APBD		37	Rp 540.000.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	KKR	24	Rp 60.000.000	APBD		24	Rp 60.000.000
1	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	KKR	13	Rp 480.000.000	APBD		13	Rp 480.000.000



1	0	0	2	0		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Unit	KKR	43	Rp 157.997.911	APBD		61	Rp 163.357.911
1	0	0	2	0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	KKR	1	Rp 29.062.500	APBD		1	Rp 29.062.500
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	KKR	14	Rp 75.000.000	APBD		14	Rp 75.000.000
1	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	Unit	KKR	12	Rp 29.585.411	APBD		12	Rp 29.585.411



1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	KKR	15	Rp 9.950.000	APBD		23	Rp 15.310.000
1	0	0	2	0	00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	KKR	1 Unit	Rp 14.400.000	APBD		1 Unit	Rp 14.400.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya disajikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

TABEL 4. 1
ALOKASI ANGGARAN DINAS SOSIAL TAHUN 2025

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)						(2)	(3)	
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	60.000.000
1	06	02	2	03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp	60.000.000
1	06	02	2	03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	30.000.000
1	06	02	2	03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	30.000.000
1	06	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Rp	15.000.000
1	06	03	2	01		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk di pulangkan ke Desa/Kelurahan asal	Rp	15.000.000
1	06	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Rp	15.000.000
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	440.000.000
1	06	04	2	01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp	320.000.000



Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)						(2)	(3)	
1	06	04	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp	50.000.000
1	06	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0003	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Rp	150.000.000
1	06	04	2	01	0004	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan dan Reunifikasi Keluarga	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0005	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rp	50.000.000
1	06	04	2	01	0006	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp	5.000.000
1	06	04	2	01	0008	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp	5.000.000
1	06	04	2	01	0010	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0011	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp	10.000.000
1	06	04	2	01	0012	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Rp	10.000.000
1	06	04	2	02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Rp	120.000.000
1	06	04	2	02	0008	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Rp	60.000.000
1	06	04	2	02	0010	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	60.000.000
1	06	04	2	02	0010	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp	670.000.000
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	20.000.000



Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)
1	06	05	2	01	Kegiatan Pemeliharaan anak-anak terlantar	Rp 10.000.000
1	06	05	2	01	0002 Sub Kegiatan Rujukan anak-anak terlantar	Rp 10.000.000
1	06	05	2	01	0003 Sub Kegiatan Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar	Rp 650.000.000
1	06	05	2	02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 50.000.000
1	06	05	2	02	0001 Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 50.000.000
1	06	05	2	02	0002 Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 550.000.000
1	06	05	2	02	0003 Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp 100.000.000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 50.000.000
1	06	06	2	01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Rp 50.000.000
1	06	06	2	01	0001 Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Rp 50.000.000
1	06	06	2	02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp 50.000.000
1	06	06	2	02	0002 Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp 5.317.236.551
1	06				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 210.000.000
1	06	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30.000.000
1	06	01	2	01	0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 30.000.000
1	06	01	2	01	0002 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp 30.000.000
1	06	01	2	01	0003 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Rp 30.000.000
1	06	01	2	01	0004 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 30.000.000



Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)						(2)	(3)	
1	06	01	2	01	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp	30.000.000
1	06	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp	30.000.000
1	06	01	2	01	0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	3.050.000.000
1	06	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	3.000.000.000
1	06	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	30.000.000
1	06	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Rp	10.000.000
1	06	01	2	02	0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp	10.000.000
1	06	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp	15.000.000
1	06	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	5.000.000
1	06	01	2	03	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp	5.000.000
1	06	01	2	03	0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	5.000.000
1	06	01	2	03	0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp	81.119.850
1	06	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	28.334.850
1	06	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	10.000.000
1	06	01	2	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp	42.785.000
1	06	01	2	05	0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	405.380.000
1	06	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	6.000.000



Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)
1	06	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 110.000.000
1	06	01	2	06	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 40.000.000
1	06	01	2	06	0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 4.380.000
1	06	01	2	06	0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 200.000.000
1	06	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 5.000.000
1	06	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 40.000.000
1	06	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp 857.738.790
1	06	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 234.000.000
1	06	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 54.000.000
1	06	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan mebel	Rp 371.588.790
1	06	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 198.150.000
1	06	01	2	07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 540.000.000
1	06	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 60.000.000
1	06	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 480.000.000
1	06	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 157.997.911
1	06	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 29.062.500
1	06	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Rp 75.000.000



Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)						(2)	(3)
						atau Kendaraan Dinas Jabatan	
1	06	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 29.585.411
1	06	01	2	09	0006	Pemeliharaan Mebel	Rp 9.950.000
1	06	01	2	09	0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 14.400.000
1	06	01	2	09	0010	Sub Kegiatan 'Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp 14.400.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya

Substansi Renja Dinas Sosial disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu di perhatikan, anantara lain :

1. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Dinas Sosial pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *Service Excellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Alokasi APBD Kabupaten Kubu Raya untuk Dinas Sosial selama ini dirasa belum dapat menyentuh semua kebutuhan masyarakat, hal ini di karenakan luasnya wilayah Kabupaten Kubu Raya.
3. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.
4. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Dinas Sosial, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.



Kami berharap, bahwa Rencanan Kerja Dinas Sosial ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan Sosial dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian dokumen Rencanan Kerja Dinas Sosial ini disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Raya, Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA**

Wasilun, S.Ag.,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP.196708081999031010